

Politik Ketuk Tilu

Oleh: HAWA SETIAWAN

(Kompas, Sabtu, 21 Februari 2009)

JAIPONGAN bertolak dari tarian rakyat, lalu diolah dan diangkat hingga sering jadi tontonan para pejabat. Uniknyanya, imbauan yang mempersoalkan kepatutan seni pertunjukan ini cenderung berasal terutama dari kalangan pejabat. Ini mungkin segi yang lucu pada politik ketuk tilu.

Kalau benar Gubernur Ahmad Heryawan mengimbau agar dandanan dan gerak jaipongan diperhalus, pasti tak ada sangkut-pautnya dengan PKS. Gerak partai Islam kini justru jauh lebih gesit dan sensual ketimbang lenggang-lenggok penari jaipongan, sampai-sampai menganggap Soeharto sebagai guru bangsa pun bisa.

Boleh jadi, Pak Ahmad Heryawan sekadar meneladani pendahulunya, Pak Aang Kunaefi, yang sempat dikatakan mempersoalkan kepatutan jaipongan. Biarlah itu jadi urusan Pak Herdiwan Iing Suranta sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Yang pasti, Mas Nanu Muda dan kawan-kawan yang dulu pernah menari jaipongan di depan Wakil Presiden Adam Malik, risau dengan imbauan seperti itu. Mereka tampaknya cemas, jangan-jangan itu gelagat bahwa kreativitas bakal terpankaskan.

Saya sendiri hanya nyengir kuda begitu kontroversi ini mencuat lagi. Kalau saja Ceu Tati Saleh masih ada, tak tahulah seperti apa reaksinya. Kebetulan, tahun lalu saya ikut memberikan putusan juri atas pemberian Anugrah Budaya Kota Bandung 2008 untuk Gugum Gumbira Tirasonjaya sebagai perintis dan pendorong kemajuan jaipongan. Bukan main, dedikasi Gugum dihargai, kreasinya tetap jadi kontroversi.

Sedikitnya ada dua hal yang patut disambut dengan keplokan. *Pertama*, Pak Gubernur yang agamis dan sangat sibuk itu rupanya masih berkenan meluangkan waktu untuk memperhatikan jaipongan. Cobalah koreografi “Kawung Anten”, Pak. *Kedua*, seniman karawitan yang sering bekerja sama dengan kalangan pelat merah, hingga program daerah sering jadi meriah, rupanya bisa juga bersikap kritis terhadap pemerintah. Ayo, kamu pasti bisa!

Namun, dalam urusan ini, sesungguhnya ada keliru sangka. Pak Gubernur pasti bakal kecewa jika berharap bahwa besok lusa para penari jaipongan bisa menjelma sebagai makhluk halus. Pasalnya bukan karena sudah adatnya gerak-gerik mereka sering terasa sensual, melainkan karena jaipongan itu sendiri, sebagaimana beragam bentuk seni lainnya, pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari bawah, di luar inisiatif dan imbauan pemerintah.

Kalau tak percaya, silakan simak lagi proses kreatif jawara dan koreografer Gugum Gumbira sebagai penggagas jaipongan itu sendiri. Gugum menciptakan jaipongan bukan karena ia bekerja juga sebagai pejabat pemerintah, melainkan karena sejak dini ia sudah terasah di bidang pencak silat dan mengenal seluk beluk tarian rakyat, khususnya yang tumbuh di pesisir utara Jawa Barat.

Gugum memperkenalkan jaipongan pada akhir dasawarsa 1970-an. Meski menuai kontroversi, ia terus memasyarakatkan kreasinya seraya mengupayakan tempatnya yang layak di jagat seni Sunda. Koreografinya ia bikin sendiri, seperti “Kawung Anten”, “Késér Bojong”, “Oray Welang”, “Réndéng Bojong”, “Toka-toka”,

“Sonténg”, dll. Ia bahkan mengupayakan studio rekaman sendiri, yakni “Jugala”, yang salah satu produknya adalah kaset rekaman jaipongan.

Walhasil, atas inisiatif non-pemerintah, jaipongan jadi populer hingga ke luar negeri. Jaipongan bahkan disebut-sebut sebagai salah satu di antara empat ikon Indonesia. Dengan itu, saya yakin bahwa jaipongan pasti terus hidup dengan caranya sendiri.

Kalau begitu, kalangan seniman seperti Mas Nanu Muda tak perlu risau amat, sebetulnya. Seniman tak perlu terjebak ke dalam kegiatan yang menunjukkan bahwa seolah-olah imbauan pejabat akan menentukan rata atau terjalnya jalan kesenian. Kelewat serius menanggapi imbauan pejabat salah-salah malah bisa menimbulkan kesan bahwa kegiatan seniman cenderung diarahkan ke lingkungan pemerintah.

Kiranya jauh lebih baik jika seniman mengupayakan otokritik, misalnya dengan memikirkan lagi jalan yang telah ditempuh. Jika jaipongan tumbuh dari tarian rakyat, masihkah jaipongan benar-benar menyatukan diri dengan kehidupan rakyat sehari-hari? Rakyat butuh hiburan, masihkah jaipongan menghibur mereka? Rakyat butuh teman, masihkah seniman menemani mereka?

Ayo, Kang Nanu, lupakan gubernur. Kembalilah ke tanah dan debu yang ditinggalkan orang-orang seperti Titim Patimah. Politik ketuk tilu harus mau beringsut dari pekarangan Disbudpar dan birokrasi sejenisnya. Kalaupun dari pucuk Gedung Sate dirasakan ada ancaman terhadap kreativitas artistik, justru karena itu seniman perlu memperkuat lagi pijakannya di akar rumput.***

HAWE SETIAWAN

Penulis lepas, mengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Universitas Pasundan, Bandung. Pendapat pribadi.